

## BAB II

### BPBD KOTA SEMARANG

#### 2.1 Peta Geografis dan Demografis Kota Semarang



**Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang**

**Sumber:** Website Pemerintah Kota Semarang

Secara geografis, Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan memiliki posisi strategis sebagai jalur penghubung antardaerah di Pulau Jawa. Kota Semarang berada pada koordinat antara  $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$  Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 373,70 km<sup>2</sup>. Wilayah administratif Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, serta Laut Jawa di sebelah utara.<sup>11</sup> Kondisi

---

<sup>11</sup> Semarang, (2024). Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Profile kota semarang.

topografi Kota Semarang terbagi menjadi wilayah dataran rendah di kawasan utara dan wilayah perbukitan di bagian selatan, sehingga menciptakan karakteristik wilayah yang beragam dan memengaruhi pola perkembangan kota, aktivitas ekonomi, hingga kerawanan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Secara administratif, Kota Semarang terdiri atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan yang tersebar pada seluruh wilayah kota. Pembagian wilayah tersebut menjadikan Semarang sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Jawa Tengah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi serta perkembangan wilayah perkotaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>12</sup>

Secara historis, perkembangan Semarang tidak terlepas dari perannya sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan sejak masa kerajaan hingga kolonial Belanda. Awalnya, Semarang merupakan kawasan pesisir yang berkembang sebagai daerah perdagangan pada masa Kesultanan Demak dan kemudian mengalami perkembangan pesat ketika berada di bawah pengaruh Kesultanan Pajang. Dalam perkembangannya, Semarang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang strategis karena didukung oleh keberadaan pelabuhan serta akses transportasi darat dan laut. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Semarang ditetapkan sebagai gemeente atau kotamadya berdasarkan Staatsblad Tahun 1906 Nomor 120 yang semakin memperkuat kedudukannya sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Jawa Tengah. Selain itu, perluasan wilayah administratif Kota Semarang juga terjadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 yang memasukkan beberapa wilayah dari Kabupaten Kendal,

---

<sup>12</sup> Semarang, (2025). Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Daftar kecamatan dan kelurahan di kota semarang.

Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak ke dalam administrasi Kota Semarang.<sup>13</sup> Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, pembagian wilayah Kota Semarang ditetapkan menjadi 16 kecamatan sebagaimana yang berlaku hingga saat ini. Perkembangan historis tersebut menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki peranan penting sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, dan transportasi yang terus berkembang hingga menjadi kota metropolitan di Jawa Tengah. Pada tahun 2025, Kota Semarang kembali menghadapi bencana banjir yang berdampak luas. Hujan deras sejak 22 Oktober 2025 menyebabkan lebih dari 40.452 jiwa terdampak banjir di tiga kecamatan utama yakni Genuk, Pedurungan, dan Gayamsari, dengan korban mengungsi mencapai sekitar 134 jiwa, serta beberapa korban meninggal dunia dan satu orang hilang akibat kondisi ekstrem tersebut. Pemerintah Kota Semarang merespons kejadian ini dengan menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem melalui Keputusan Wali Kota Nomor 300.2/1010 Tahun 2025, berlaku mulai 23 Oktober 2025 sebagai langkah awal dalam penanganan darurat dan koordinasi lintas instansi. Status ini kemudian dijadikan dasar operasional penanggulangan dengan melibatkan BNPB, BPBD Provinsi, dan BPBD Kota untuk melakukan evakuasi, pemompaan air (pompanisasi), pendirian posko darurat, serta distribusi logistik kepada masyarakat terdampak.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang secara normatif mengatur kebijakan pembangunan

---

<sup>13</sup> Semarang (2022). Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Sejarah.

yang berisiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pembagian peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Perda ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menetapkan kebijakan, mengefektifkan koordinasi antar lembaga, serta melaksanakan tahapan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur pada setiap fase bencana, termasuk pada respons darurat banjir tahun 2025 yang melibatkan mekanisme operasional dan instrumen hukum yang telah diformulasikan sebelumnya. Dengan demikian, kejadian banjir tahun 2025 tidak hanya menunjukkan keberlanjutan risiko bencana yang kompleks di wilayah pesisir Kota Semarang, tetapi juga tantangan implementatif Perda penanggulangan bencana yang mensyaratkan integrasi kebijakan mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, dan pemulihan pascabencana dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

**Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Semarang**

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)			
	Laki-laki		Perempuan	
	2023	2024	2023	2024
Mijen	45.072	46.420	45.072	46.668
Gunung Pati	50.310	50.735	50.442	50.842
Banyumanik	70.675	70.861	72.758	72.885
Gajah Mungkur	27.602	27.600	28.748	28.734
Semarang Selatan	30.215	30.224	31.964	31.794
Candisari	37.302	37.317	38.312	38.125
Tembalang	98.833	100.313	100.029	101.508
Pedurungan	97.167	97.609	99.359	99.859
Genuk	66.946	68.709	65.527	68.647
Gayamsari	34.998	35.019	35.411	35.369
Semarang Timur	32.261	32.280	34.220	34.195
Semarang Utara	58.194	58.229	59.693	59.636
Semarang Tengah	26.438	26.454	28.775	28.754
Semarang Barat	73.311	73.355	76.015	75.972

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)			
	Laki-laki		Perempuan	
	2023	2024	2023	2024
Tugu	16.906	17.054	16.889	17.038
Ngaliyan	72.403	72.998	73.092	73.630
<b>TOTAL</b>	<b>838.437</b>	<b>845.177</b>	<b>856.306</b>	<b>863.656</b>
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>1.683.524</b>		<b>1.719.962</b>	

Sumber: BPS Kota Semarang

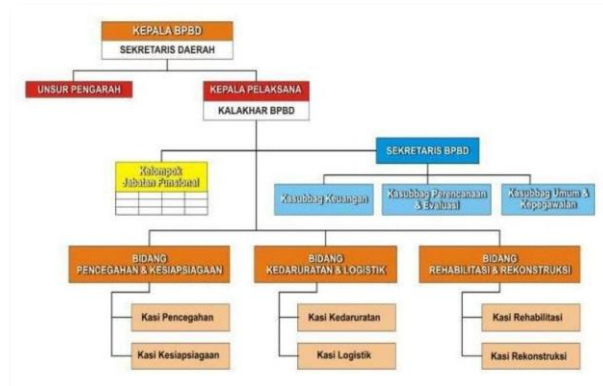
Data jumlah penduduk Kota Semarang dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya dinamika pertumbuhan penduduk yang berimplikasi langsung terhadap meningkatnya tekanan terhadap ruang dan lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk tersebut berkontribusi pada meningkatnya kebutuhan lahan permukiman, infrastruktur, serta fasilitas publik, yang dalam praktiknya sering kali mendorong alih fungsi lahan, termasuk berkurangnya kawasan resapan air. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memperparah permasalahan banjir di Kota Semarang, mengingat daya dukung lingkungan yang semakin menurun tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk.

Kepadatan penduduk yang tinggi, terutama di wilayah dataran rendah dan kawasan pesisir, meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana banjir. Semakin besar jumlah penduduk yang bermukim di kawasan rawan banjir, semakin besar pula potensi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, seperti kerusakan permukiman, terganggunya aktivitas ekonomi, serta menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap produksi limbah domestik dan penyumbatan saluran

drainase, yang turut memperburuk kapasitas sistem pengendalian banjir di perkotaan.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Semarang perlu mengintegrasikan aspek kependudukan dalam kebijakan penanggulangan banjir melalui pendekatan tata ruang yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko bencana. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan distribusi penduduk, pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan rawan banjir, serta penyediaan infrastruktur drainase dan pengendali banjir yang memadai. Selain itu, edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta pengelolaan sampah menjadi elemen penting dalam mengurangi risiko banjir. Dengan demikian, permasalahan banjir di Kota Semarang tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis infrastruktur, tetapi juga sebagai konsekuensi dari dinamika demografis dan tata kelola pembangunan yang perlu ditangani secara komprehensif dan terintegrasi.

## 2.2 Gambaran Umum BPBD Kota Semarang



**Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BPBD Kota Semarang**

**Sumber:** BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kota. BPBD dibentuk sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang kemudian diimplementasikan dalam regulasi daerah. Secara kelembagaan, BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, dengan struktur organisasi yang mencakup unsur pengarah dan unsur pelaksana. Keberadaan BPBD Kota Semarang menjadi sangat penting mengingat karakteristik wilayah kota yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana, khususnya banjir, rob, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang pada dasarnya berorientasi pada terwujudnya Kota Semarang yang tangguh dan resilien terhadap bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis pengurangan risiko bencana, optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam penanganan tanggap darurat, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Selain itu, BPBD juga berupaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam membangun budaya sadar bencana melalui edukasi dan pemberdayaan komunitas. Secara konseptual, visi dan misi tersebut mencerminkan komitmen BPBD Kota Semarang dalam membangun tata kelola penanggulangan bencana yang efektif, responsif, dan adaptif terhadap karakteristik kerawanan wilayah, khususnya terhadap ancaman banjir dan rob yang menjadi permasalahan utama di Kota Semarang.

Secara fungsional, BPBD Kota Semarang menyelenggarakan beberapa fungsi utama. Pertama, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. Kedua, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Ketiga, pelaksanaan komando dan pengendalian dalam situasi tanggap darurat bencana, termasuk mobilisasi sumber daya, evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Keempat, pelaksanaan upaya pra-bencana melalui

kegiatan mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, serta penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Kajian Risiko Bencana (KRB). Kelima, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana guna memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan.

BPBD Kota Semarang juga memiliki fungsi fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana, antara lain melalui pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dan penyelenggaraan edukasi kebencanaan. Dengan demikian, tugas dan fungsi BPBD tidak hanya bersifat responsif terhadap kejadian bencana, tetapi juga preventif dan strategis dalam membangun sistem ketahanan daerah terhadap berbagai potensi ancaman bencana, khususnya banjir dan rob yang menjadi karakteristik kerawanan utama Kota Semarang.

### **2.3 Gambaran Umum Banjir Kota Semarang**

Banjir di Kota Semarang merupakan fenomena hidrometeorologis yang bersifat kronis dan multidimensional, ditandai dengan keterkaitan antarwilayah yang menyebabkan genangan air tidak hanya terjadi secara parsial, melainkan merembet lintas kecamatan, khususnya di Kecamatan Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Barat, dan Tugu. Secara geografis, Kota Semarang memiliki karakteristik wilayah berupa dataran rendah di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa serta wilayah perbukitan di bagian selatan. Kondisi ini menciptakan pola aliran air dari wilayah hulu ke hilir

yang terkonsentrasi di kawasan pesisir, sehingga kecamatan-kecamatan di bagian utara dan timur kota menjadi daerah akumulasi limpasan air. Kecamatan Genuk, misalnya, kerap mengalami banjir akibat kombinasi curah hujan tinggi, limpasan dari wilayah atas, serta banjir rob yang dipengaruhi pasang air laut, diperparah oleh kondisi penurunan muka tanah yang signifikan. Fenomena serupa juga terjadi di Kecamatan Semarang Utara dan Tugu yang secara langsung berhadapan dengan laut, di mana rob menjadi faktor dominan yang memperpanjang durasi genangan, bahkan ketika curah hujan telah menurun.

Sedangkan itu, Kecamatan Gayamsari dan Semarang Timur menghadapi persoalan banjir yang lebih dipengaruhi oleh tingginya kepadatan penduduk, perubahan tata guna lahan, serta keterbatasan kapasitas sistem drainase perkotaan. Alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, sehingga meningkatkan volume limpasan permukaan saat hujan terjadi. Air yang tidak tertampung oleh sistem drainase kemudian mengalir dan terakumulasi, serta dalam kondisi tertentu melimpas ke wilayah lain yang memiliki elevasi lebih rendah. Hal ini menjadikan banjir di kedua kecamatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem banjir kawasan yang lebih luas. Di sisi lain, Kecamatan Semarang Barat juga mengalami genangan yang cukup signifikan akibat kombinasi antara curah hujan, buruknya drainase, serta pengaruh pasang laut pada titik-titik tertentu. Keterhubungan sistem saluran air antarwilayah menyebabkan ketika terjadi kelebihan debit di satu kawasan, maka dampaknya dapat dirasakan di kawasan lain dalam bentuk banjir yang merembet.

Secara empiris, berbagai laporan kebencanaan daerah menunjukkan bahwa banjir di Kota Semarang cenderung terjadi secara berulang setiap tahun dengan intensitas yang bervariasi, terutama pada musim penghujan. Genangan dapat berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung pada kondisi curah hujan, pasang surut air laut, serta kapasitas sistem pengendalian banjir yang tersedia. Infrastruktur seperti tanggul, pompa air, dan polder memang telah dibangun sebagai upaya mitigasi, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas permasalahan yang ada. Dengan demikian, gambaran umum banjir di Kota Semarang menunjukkan adanya pola keterkaitan spasial antar kecamatan yang dipengaruhi oleh faktor topografi, hidrologi, dan aktivitas antropogenik, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan terpadu yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga berbasis wilayah dan berkelanjutan.